



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZHARI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 85597

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 690.000.000

1. Tanah Seluas 391 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 321 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA LHOKSEUMAWE , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
4. Tanah Seluas 13000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 266.000.000

1. LAINNYA, POLIGON SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
4. LAINNYA, VALUAS SEPEDA Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 118.400.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 964.966.394



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.039.366.394
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.039.366.394

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNAWAN PHONNA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 831350

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.108.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 477 m2/212 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.692.500.000
2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.200.000.000
4. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HADIAH Rp. 136.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 323.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, VESPA SUPER 150 CC Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 0207, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOTOR, HONDA KIJANG Tahun 1969, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 318.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 232.831.042

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.982.331.042



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.982.331.042

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHARDIMAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 831283

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, LAINNYA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 137.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 124.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.169.100.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.169.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.